

BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis dan pembahasan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dan selanjutnya hasil analisis tersebut akan dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Analisis ini bertujuan untuk melihat implikasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terhadap kinerja pendidikan tahun 2007-2009.

5.1 Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan

Pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan menghendaki supaya pembangunan pendidikan dilaksanakan secara terencana, terarah, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang sebagai pedoman dan pemberi arah pembangunan pendidikan tersebut disamping pengendali pemanfaatan sumber daya yang terbatas ketersediaannya. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut komitmen dan konsistensi dari seluruh *stakeholder* penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun suatu perencanaan dan penganggaran termasuk dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan kepada perencanaan yang telah disusun secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat inilah diharapkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan harapan agar sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut dapat tercapai. Sehubungan dengan hal di atas, maka penelitian ini mencoba untuk melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama 3 (tiga) tahun

terakhir yaitu tahun 2007-2009 yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009.

5.1.1 Analisis Konsistensi antara RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang mempunyai fungsi antara lain adalah untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menuntut adanya kesinambungan dan konsistensi antara RKPD dan APBD, maka penulis melakukan penilaian tingkat konsistensi program dan kegiatan bidang pendidikan yang ada pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007 dengan program dan kegiatan bidang pendidikan yang terdapat dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007. Hasilnya dapat dilihat melalui tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Matrik Konsolidasi antara RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007	APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pembangunan ruang ibadah	1. Pembangunan ruang ibadah
2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
3. Pengadaan mebeleur sekolah	3. Pengadaan mebeleur sekolah
4. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	4. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
5. Pelatihan penyusunan KTSP bagi guru TK	5. Pelatihan penyusunan KTSP bagi guru TK

Tabel 5.1 (Sambungan)

6. Seminar dan Lokakary PAUD		6. Pembangunan pagar dan lokal
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	↔	1. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
2. Pengadaan buku dan alat tulis siswa	↔	2. Pengadaan buku dan alat tulis siswa
3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	↔	3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
4. Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	↔	4. Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
5. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	↔	5. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
6. Pelatihan penyusunan kurikulum	↔	6. Pelatihan penyusunan kurikulum
7. Penunjang operasional DAK	↔	7. Penunjang operasional DAK
8. Rehabilitasi ruang belajar SD (DAK)	↔	8. Rehabilitasi ruang belajar SD (DAK)
9. Pengadaan sarana mobilitas sekolah		9. Lanjutan pembangunan labor SMP Negeri 4
10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah		10. Pembangunan RKB SMP Negeri 5 Tahap 1
11. Pembangunan jaringan instalasi listrik		11. Pembangunan RKB SMP Negeri 5 Tahap 2
12. Rehabilitasi taman dan lapangan parkir		
13. Pembangunan DAM		
3. Program Pendidikan Menengah		3. Program Pendidikan Menengah
1. Penambahan ruang kelas sekolah	↔	1. Penambahan ruang kelas sekolah
2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	↔	2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
3. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	↔	3. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
4. Pengadaan buku dan alat tulis siswa	↔	4. Pengadaan buku dan alat tulis siswa
5. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	↔	5. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
6. Rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	↔	6. Rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
7. Pengadaan perlengkapan sekolah	↔	7. Pengadaan perlengkapan sekolah
8. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	↔	8. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Tabel 5.1 (Sambungan)

9. Pelatihan penyusunan kurikulum	↔	9. Pelatihan penyusunan kurikulum
10. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu	↔	10. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu
11. Pelaksanaan paket C setara SMA	↔	11. Pelaksanaan paket C setara SMA
12. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industry	↔	12. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industry
13. Try out ujian nasional SLTP/SLTA	↔	13. Try out ujian nasional SLTP/SLTA
14. Rehabilitasi taman, lapangan dan parkir		14. Pembuatan pagar SMA 1
15. Rehab ruang serbaguna/aula		15. Pelatihan olimpiade SLTP/SLTA
16. Pembangunan UKS		16. Lanjutan Pembangunan RKB dan pagar SMAN 3
17. Pembangunan ruang ibadah		17. Dana Operasional Sekolah
18. Pengembangan materi belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan komputer		18. Pembangunan labor SMA Negeri 3
19. Lomba penelitian ilmiah remaja		19. Pembangunan infrastruktur penunjang operasional ICT
20. LKS SMK		20. Pendaman dan pematangan tanah SMKN 2
21. Beasiswa bagi anak kurang mampu		21. Sharing standar peralatan belajar SMK SSN
22. Lomba penelitian ilmiah remaja		
23. Lomba marching band SLTA		
24. Pembangunan learning research centre		
4. Program Pendidikan non Formal		4. Program Pendidikan non Formal
1. Pengembangan pendidikan keaksaraan	↔	1. Pengembangan pendidikan keaksaraan
2. Pembinaan olahraga	↔	2. Pembinaan olahraga
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan	↔	1. Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan
2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	↔	2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	↔	3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pelaksanaan kelebihan mengajar guru	↔	4. Pelaksanaan kelebihan mengajar guru
5. Magang guru ke luar negeri		5. Pelatihan pengoperasionalan multimedia SMP, SMA
6. Workshop entrepreneurship		6. Evaluasi angka kredit guru

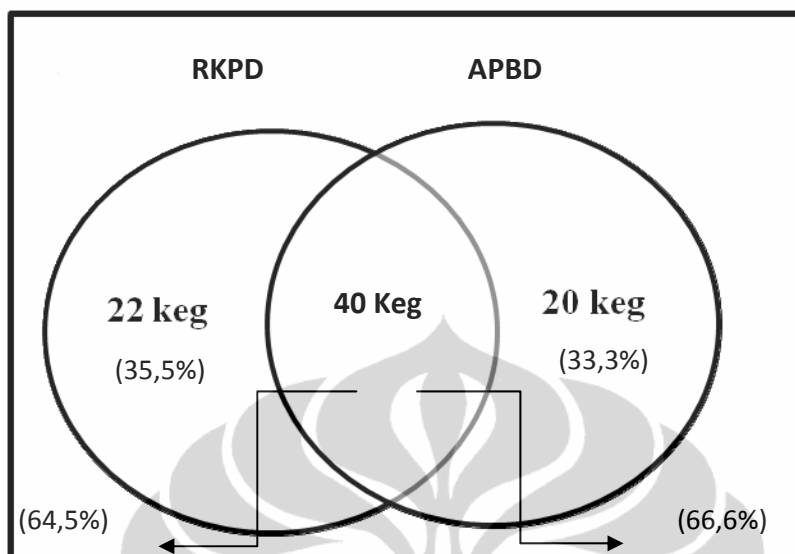
Tabel 5.1 (Sambungan)

7. Pelatihan pengoperasionalan multimedia	7. Pelatihan penyusun alat peraga guru
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	1. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
2. Pelaksanaan ujian akhir SD, SMP, SMA dan Paket A, B, dan C	2. Pelaksanaan ujian akhir SD, SMP, SMA dan Paket A, B, dan C
3. Perencanaan pembangunan pusat sumber belajar	3. Perencanaan pembangunan pusat sumber belajar
4. Penerimaan siswa baru	4. Penerimaan siswa baru
5. Pengembangan dan rekayasa kurikulum ABS-SBK	5. Pengembangan dan rekayasa kurikulum ABS-SBK
6. Penyusunan profil dan sejarah pendidikan	6. Penyusunan profil dan sejarah pendidikan
7. Pengembangan olahraga prestasi di sekolah	7. Pengembangan olahraga prestasi di sekolah
8. Jurnal Pendidikan	8. Jurnal Pendidikan
9. Rekayasa kurikulum ABS-SBK	9. Popda dan Pordini
10. Pengembangan dewan pendidikan	10. Pembinaan OSIS dan Kepemudaan
	11. Pembinaan dan pelatihan paskibraka
	12. Porsenida
	22. Pengembangan pendidikan keaksaraan berbasis kelurahan
Keterangan: tanda ↔ artinya ada sinkronisasi antar kegiatan	
25.	

Sumber: RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007 dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007 terdapat 6 program dan 62 kegiatan bidang pendidikan, sedangkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007 terdapat 6 program dan 60 kegiatan bidang pendidikan. Secara umum, kegiatan dalam kedua dokumen tersebut ada yang sudah sinkron dan ada yang belum. Artinya ada sebagian kegiatan yang sebelumnya direncanakan dalam RKPD tapi tidak terakomodir dalam APBD, dan ada sebagian yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKPD tetapi ada dalam APBD.

Untuk melihat bagaimana keterkaitan antara kedua dokumen tersebut, dapat dilihat melalui diagram Venn berikut:



Gambar 5.1
Diagram Keterkaitan Antara RKPД dengan APBD
Kota Padang Panjang Tahun 2007

Sumber: RKPД dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007 (data diolah)

Diagram di atas menunjukkan bahwa dari 62 kegiatan yang ada di RKPД dan 60 kegiatan yang ada di APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007, hanya 40 kegiatan yang sinkron. Artinya hanya 66,7% kegiatan yang ada dalam APBD tersebut yang berpedoman pada RKPД dan 64,5% kegiatan RKPД yang diakomodir dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007. Sedangkan 22 (35,5%) kegiatan lainnya yang ada dalam RKPД tidak terakomodir dalam APBD dan penyusunan 20 (33,3%) kegiatan yang ada dalam APBD tidak konsisten atau tidak berpedoman pada RKPД.

5.1.2 Analisis Konsistensi antara RKPД dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008

Sebagaimana RKPД Kota Padang Panjang Tahun 2007, maka RKPД Kota Padang Panjang Tahun 2008 juga merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah daerah (Renstra Daerah) Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008. Sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang menghendaki kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka

penyusunan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008 juga harus konsisten terhadap RKPD Kota Padang Panjang.

Analisis tentang tingkat konsistensi antara RKPD Kota Padang Panjang dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008 ditunjukkan melalui matrik berikut:

Tabel 5.2
Matrik Konsolidasi antara RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2008 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2008	APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD 3. Pengadaan mobiler dan sarana pendukung 4. Pengadaan sarana mobilitas sekolah (mobil jemputan) 5. Sarana belajar (TK Pembina) 6. Seminar dan lokakarya PAUD 7. Publikasi dan sosialisasi program PAUD 8. Studi banding pembina dan pengelola PAUD	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3. Pengadaan mebeleur sekolah 4. Pembangunan lanjutan lokal dan DAM TK Pembina
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 3. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 4. Pengadaan mobiler sekolah 5. Pengadaan perlengkapan sekolah 6. Lomba olimpiade sains SMP 7. Lomba mengarang bahasa indonesia SMP 8. Lomba mengarang pidato bahasa inggris SMP	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 3. Penambahan sarana air bersih dan sanitary 4. Pengadaan mobiler 5. Pengadaan perlengkapan sekolah 6. Lomba olimpiade tingkat SLTP 7. Lomba mengarang Bahasa Indonesia tingkat SLTP 8. Lomba pidato bahasa Inggris tingkat SLTP

Tabel 5.2 (Sambungan)

<ul style="list-style-type: none"> 9. Pembangunan gedung sekolah 10. Pengadaan sarana mobilitas sekolah (pembangunan DAM) 11. Rehabilitasi taman, lapangan, dan parkir 12. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapan 13. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TI dan komunikasi ICT 14. DAK Bid. Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> 9. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 10. Dana operasional pemeliharaan sekolah 11. Try out ujian nasional SD 12. Pengadaan perlengkapan UKS 13. Pendaman tanah SMPN 4 14. Pembangunan baru lokal RKB bertingkat SMPN 3 15. Pembuatan pagar perpustakaan, gapura dan ruang satpam 16. Lanjutan pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah SMPN 5 17. Rehab ruang belajar SD (DAK) 18. Penunjang operasional DAK 19. Pembangunan 4 lokal SMP 1
<p>3. Program Pendidikan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penyusunan kurikulum 2. Try out ujian nasional SLTP/SLTA 3. Lomba olimpiade sains SLTA 4. Pengadaan perlengkapan sekolah 5. Pengadaan mobiler sekolah 6. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7. Rehab sedang/berat ruang serbaguna/aula 8. Rehabilitasi taman, lapangan, dan parkir 9. Pembangunan UKS 10. Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitary 11. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 12. Pemeliharaan ruang ibadah 13. Lomba POP 14. LKS SMK 15. Lomba penelitian ilmiah remaja 	<p>3. Program Pendidikan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penyusunan kurikulum 2. Try out ujian nasional SLTP/SLTA 3. Lomba olimpiade tingkat SLTA 4. Pengadaan perlengkapan sekolah 5. Pengadaan mebeleur sekolah 6. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7. Rehab sedang/berat ruang serbaguna/aula 8. Rehab sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 9. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 10. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 11. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 12. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 13. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah 14. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perelengkapannya

Tabel 5.2 (Sambungan)

<p>16. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi komputer</p> <p>Pembangunan gedung sekolah</p> <p>17. Pembangunan ruang ibadah</p> <p>18. Pemeliharaan instalasi listrik</p> <p>19. Pemeliharaan gedung sekolah</p> <p>20. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa</p>	<p>15. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu</p> <p>16. Pelaksanaan paket C setara SMA</p> <p>17. Pelatihan olimpiade SLTP/SLTA</p> <p>18. Pelatihan pengoperasionalan multimedia SLTP/SLTA</p> <p>19. Pembangunan kantor SMK Negeri 2</p> <p>20. Pembangunan kantor dan lanjutan pagar SMA Negeri 3</p> <p>21. Kegiatan magang guru dan siswa berprestasi ke luar negeri</p> <p>22. Magang kepala sekolah dan guru SMP</p> <p>23. Pembangunan infrastruktur</p>
<p>4. Program Pendidikan non Formal</p> <p>1. Life skill (kecakapan hidup)</p> <p>2. Pembinaan olahraga</p>	<p>4. Program Pendidikan non Formal</p> <p>1. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup</p> <p>2. Pengembangan pendidikan keaksaraan</p>
<p>5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>1. Pemantapan kerja guru</p> <p>2. Penilaian dan peningkatan mutu pendidikan</p> <p>3. Workshop Enterpreneurship</p> <p>4. Pelatihan pengoperasionalan multi media</p> <p>5. Magang guru kelas internasional keluar negeri</p> <p>6. Pelatihan guru-guru olah raga</p> <p>7. Peningkatan mutu tenaga pendidik</p> <p>8. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (SMK dan SMP)</p>	<p>5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>1. Pemantapan kerja guru</p> <p>2. Pelaksanaan sertifikasi pendidik</p> <p>3. Pembinaan mutu</p> <p>4. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>5. Rekayasa kurikulum entrepreneurship</p> <p>6. Evaluasi angka kredit guru</p> <p>7. Sertifikasi guru SD, SMP, SMA dan SMK</p> <p>8. Jurnal pendidikan</p>
<p>6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>1. Pembinaan olahraga prestasi di sekolah</p> <p>2. POPDA dan PORDINI</p>	<p>6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>1. Pengembangan olahraga prestasi di sekolah</p> <p>2. Pelatihan dan pertandingan POPDA/PORDINI</p>

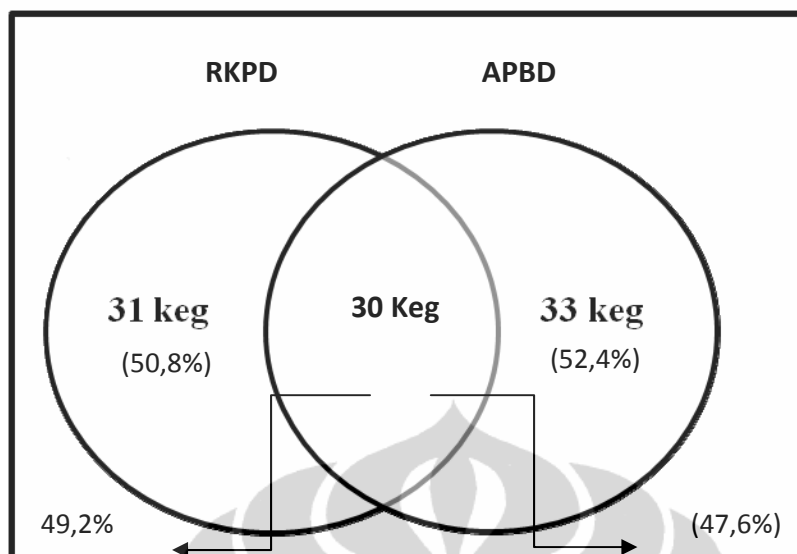
Tabel 5.2 (Sambungan)

3. Pembinaan OSIS dan Kepemudaan	←	→	8. Pembinaan OSIS dan kepemudaan
4. Pembinaan dan pelatihan paskibraka	←	→	9. Paskibraka
5. PORSENIDA	←	→	10. Porsenida
6. Pengembangan dan rekayasa kurikulum ABS-SBK			11. Perencanaan pembangunan pusat sumber belajar Pelaksanaan ujian akhir SD, SMP, SMA dan Paket A, B, dan C
			12. Revisi buku BAM
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan			
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan			
2. Pengembangan bahan pustaka			
3. Peningkatan minat baca dan keterampilan anak			
Keterangan: tanda ↔ artinya ada sinkronisasi antar kegiatan			

Sumber: RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008 (data diolah)

Matrik di atas menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008 belum sepenuhnya berkesinambungan. Hal ini terlihat pada banyaknya kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2008 yang tidak terakomodir dalam APBD Tahun 2008, begitu juga dengan banyaknya kegiatan dalam APBD yang muncul begitu saja padahal sebelumnya tidak direncanakan dalam RKPD.

Dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2008 terdapat 7 program dan 61 kegiatan bidang pendidikan sedangkan dalam APBD Kota Padang Panjang terdapat 6 program dan 63 kegiatan bidang pendidikan. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui diagram venn pada gambar 5.2 berikut:



Gambar 5.2
Diagram Keterkaitan Antara RKPD dengan APBD
Kota Padang Panjang Tahun 2008

Sumber: RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2008 (data diolah)

Diagram di atas menunjukkan bahwa dari 61 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tersebut hanya 30 (49,2%) kegiatan yang diakomodir dalam APBD sedangkan sisanya sebanyak 31 (50,8%) kegiatan tidak jadi terlaksana karena tidak dianggarkan dalam APBD. Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 63 kegiatan yang ada di APBD hanya 30 (47,6%) kegiatan yang penyusunannya konsisten atau berpedoman kepada RKPD, sedangkan 33 (52,4%) kegiatan lainnya, penyusunannya tidak mempedomani RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2008. Angka yang ditunjukkan dari hasil analisa konsistensi pada tahun 2008 ini mencerminkan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran yang lebih rendah dari tahun sebelumnya (tahun 2007).

5.1.3 Analisis Konsistensi antara RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009

Program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013. Tahun 2009 merupakan tahun

pertama dari pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang tersebut. Untuk melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan tahun 2009 dapat dilihat melalui matrik konsolidasi antara RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009 berikut:

Tabel 5.3
Matrik Konsolidasi antara RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009
dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009	APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	
1. Pengadaan buku PAUD	1. Pengadaan buku dan alat tulis siswa
2. Pengadaan mebeleur dan alat pembelajaran TK Pembina	2. Pengadaan mebeleur sekolah
3. Pelatihan guru dan kepala TK se kota Padang Panjang	3. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD
5. Sosialisai program PAUD	5. Publikasi dan sosialisasi PAUD
6. Pelatihan PAUD terintegrasi dengan Posyandu	6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD
7. Pembinaan organisasi penyelenggara dan kelembagaan PAUD	7. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
8. Penataan lingkungan sekolah	
9. DOP TK Pembina	
10. DOP TK	
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
3. Try Out Ujian Akhir SD	3. Try out ujian nasional SD
4. Bedah Kurikulum SD	4. Bedah kurikulum SD
5. Pengadaan mobiler sekolah	5. Pengadaan mobiler sekolah
6. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	6. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
7. Pengadaan perlengkapan sekolah	7. Pengadaan perlengkapan sekolah
8. Pembangunan ruang kelas belajar dan ruang kelas belajar bertingkat	8. Pembangunan ruang kelas belajar dan ruang kelas belajar bertingkat

Universitas Indonesia

sekolah	sekolah
---------	---------



Tabel 5.3 (Sambungan)

9. Rehab Ruang Labor SMP	9. Rehab sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
10. Rehab Lapangan Olahraga SMP	10. Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
11. Lomba Olimpiade Tingkat SLTP	11. Lomba Olimpiade Tingkat SLTP
12. Lomba mengarang Bahasa Indonesia tingkat SLTP	12. Lomba mengarang Bahasa Indonesia tingkat SLTP
13. Pengadaan Alat UKS SD	13. Pengadaan peralatan UKS
14. Pembangunan gedung sekolah	14. Pembangunan gedung sekolah
15. DOP Sekolah Dasar	15. Dana operasional pemeliharaan sekolah
16. Pembinaan Olimpiade MIPA, Pasiad	16. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17. Penyusunan /Pencetakan Materi Ajar PPQH	17. Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
18. Penyempurnaan KTSP	18. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs
19. Pembinaan Sekolah Sehat	19. Penunjang operasional DAK Tahun 2009
20. Rehab Ruang Untuk Mushala SD	20. Pengembangan materi pembelajaran siswa
21. Pelatihan Perpustakaan SD	21. Operasional tim manajemen BOS
22. Pengadaan Terali Sekolah SD	22. Subsidi rehabilitasi ruang kelas
23. Rehab Rumah Dinas Kepsek SD	
24. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SD	
25. Pekan Kreativitas Anak Berkebutuhan Khusus dan Layanan Khusus	
26. Pengembangan program pengajaran dan Ekskul SDLB	
27. Biaya Pengiriman Mengikuti Perlombaan Ke Tingkat Propinsi dan Pusat	
28. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 SD	
29. Studi Banding Guru SD	
30. Pembebasan Tanah SD	
31. Pengadaan Jaringan Listrik SMP	
32. Lokakarya Menghadapi Tahun Ajaran Baru SMP	
33. KKG SMP	
34. Pelatihan Peningkatan Kualitas Mengajar SMP	
35. Pelatihan ICT SMP	
36. Pembangunan Perangkat Radio SMP	
37. Pengadaan Perlengkapan Kantor SMP	

Tabel 5.3 (Sambungan)

3. Program Pendidikan Menengah	3. Program Pendidikan Menengah
1. Penyelenggaraan Paket C Setara SLTA	1. Penyelenggaraan paket C setara SLTA
2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
3. Pengadaan mebeleur siswa	3. Pengadaan mebeleur sekolah
4. Penambahan ruang kelas sekolah	4. Penambahan ruang kelas sekolah
5. Try out ujian nasional SLTP/SLTA	5. Try out ujian nasional SLTP/SLTA
6. Pelatihan Olimpiade Sains SLTP/SLTA	6. Pelatihan olimpiade sains SLTP/SLTA
7. Lomba Olimpiade Tingkat SLTA	7. Lomba olimpiade tingkat SLTA
8. Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SLTP	8. Lomba pidato bahasa Inggris tingkat SLTP
9. Penunjang operasional ICT centre	9. Penunjang operasional ICT centre
10. Pelatihan Pengoperasionalan Multi Media	10. Pelatihan pengoperasionalan multimedia SLTP/SLTA
11. Pengadaan perlengkapan sekolah	11. Pengadaan perlengkapan sekolah
12. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	12. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
13. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	13. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
14. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	14. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
15. Pengadaan Buku	15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis kantor
16. Pelatihan Penyusunan Kurikulum	16. Pelatihan penyusunan kurikulum KTSP
17. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	17. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
18. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	18. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
19. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	19. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
20. Pendaman Tanah	20. Pendaman tanah/perbaiki dinding pendaman tanah SMK 2
21. Lomba Mengarang Bahasa Indonesia Tingkat SLTP/SLTA	21. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
22. Pelatihan Work Skill/Keterampilan Tingkat SMK	22. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu
23. Musyawarah Wakil Kurikulum SLTP/SLTA	23. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
24. Pemantapan Kerja Guru (PKG)	
25. Magang Siswa Berprestasi ke Luar Negeri	
26. Penuntasan Wajar 12 Tahun	

Tabel 5.3 (Sambungan)

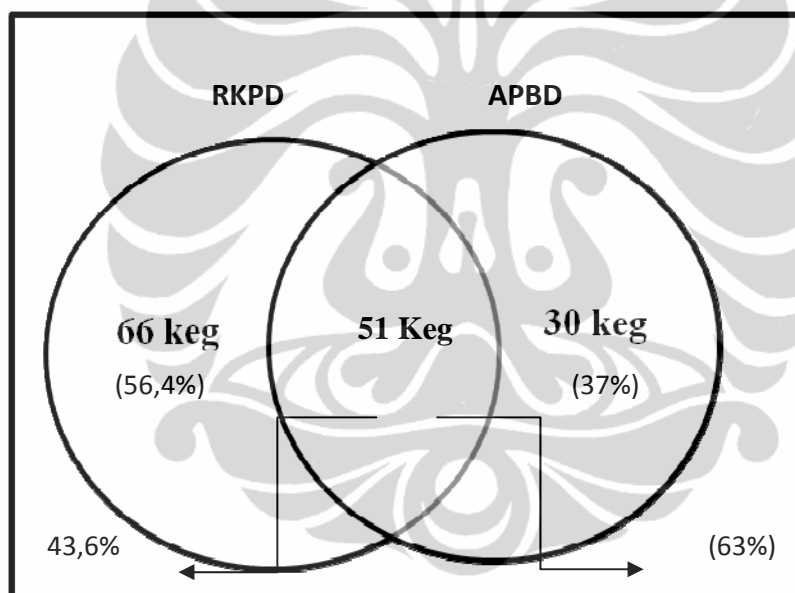
<ul style="list-style-type: none"> 27. Pembangunan Lapangan Olahraga 28. Pembangunan Labor Bahasa 29. Pembangunan Mushalla 30. Pembangunan Ruang Belajar Sekolah Berstandar Internasional 31. Rehab Asrama SMA 1 32. Pengembangan SDM Guru 33. Pengembangan Sekolah Binaan dan Sekolah Mandiri 34. Pembinaan Pengembangan Diri Siswa 35. Pembinaan Bidang Organisasi Manajemen Siswa 36. Lomba dan Kejuaran Siswa 37. Rehab Sarana Olahraga 38. Pembangunan Kantin dan Koperasi Sekolah 39. Pembuatan Selasar 40. Pembuatan Tempat Wudhuk dan Riol Saluran 41. Sharing Consultant ISO 9000-2001 SMA dan SMK Swasta 42. Peningkatan Kegiatan Ekstra kurikuler 43. Pembangunan Gedung Perpustakaan 44. Pengembangan Program Pengajaran 	<ul style="list-style-type: none"> 24. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 25. Tes persiapan Ujian nasional siswa SLTP kelas XII 26. Penerimaan siswa baru masa orientasi siswa 27. Dana sharing
<p>4. Program Pendidikan non Formal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Life Skill 2. Pemberdayaan Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 3. Jambore PTK PNF 4. Pameran Hari Aksara Internasional (SKB) 5. Kesetaraan Multi Grade (Paket A dan B) 6. KF Lanjutan 7. Pelatihan Manajemen Penyelenggara Paket A, B, Kursus & PKBM 8. Pelatihan Tutor Pendidikan Non Formal dengan Program KTSP 	<p>4. Program Pendidikan non Formal</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 3. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 4. Pengembangan pendidikan keaksaraan 5. Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran 6. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 7. Penyediaan jasa dan operasional motor pintar

Tabel 5.3 (Sambungan)

<p>5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sertifikasi Guru TK s.d SLTA 2. Evaluasi Angka Kredit Guru 3. Jurnal Pendidikan 4. Sosialisasi Sertifikasi Guru TK s.d SLTA 5. Tunjangan Profesi Sertifikasi Guru Daerah 	<p>5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi guru SD, SMP, SMA dan SMK 2. Evaluasi angka kredit guru 3. Jurnal pendidikan 4. Pembinaan mutu 5. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 6. Pembinaan kelompok kerja guru 7. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
<p>6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paskibraka Tingkat Kota dan Propinsi 2. Porsenida 3. Pelaksanaan Ujian Akhir SD, SMP, SMA/SMK dan Paket A, B dan C 4. Pembinaan Olahraga Prestasi di Sekolah 5. Pembinaan OSIS 6. Pemutakhiran Data Pendidikan 7. POPDA dan PORDINI 8. Pembangunan Pusat Sumber Belajar 9. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 10. Pembinaan Mutu Pendidikan 11. Operasional Radio Informasi Gempa dan Mitigasi Bencana 12. Porseni Kecamatan 13. Pengembangan KTSP Kota 	<p>6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paskibraka 2. Porsenida 3. Pelaksanaan ujian akhir SD, SMP, SMA dan Paket A, B, dan C 4. Pengembangan olahraga prestasi di sekolah 5. Pembinaan OSIS dan kepemudaan 6. Pemutakhiran data pendidikan 7. Pengembangan kreatifitas penyelenggara pendidikan 8. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 9. Tes kemampuan minat dan bakat siswa/ tes intelegensia 10. Kegiatan pengembangan kurikulum SD, SLTP dan SLTA 11. Pelaksanaan ujian sekolah SMK 1
<p>Keterangan: tanda ↔ artinya ada sinkronisasi antar kegiatan</p>	

Sumber: RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009 dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa di RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009 terdapat 6 program dan 117 kegiatan bidang pendidikan dan di APBD Kota Padang Panjang terdapat 6 program dan 81 kegiatan bidang pendidikan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2009 belum konsisten terbukti dengan banyaknya kegiatan di RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009 yang belum diakomodir dalam APBD Tahun 2009, begitu juga dengan banyaknya kegiatan dalam APBD Tahun 2009 yang tidak mempedomani RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009. Keterkaitan kegiatan bidang pendidikan yang ada pada RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009 dapat dilihat melalui diagram venn pada gambar 5.3 berikut:



Gambar 5.3
Diagram Keterkaitan antara Kegiatan Bidang Pendidikan di RKPD dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009

Sumber: RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009 (data diolah)

Diagram di atas menunjukkan bahwa dari 117 kegiatan bidang pendidikan yang ada di RKPD dan 81 kegiatan bidang pendidikan yang ada di APBD Kota Padang Panjang Tahun 2009, hanya 51 kegiatan yang sinkron satu sama lain. Artinya hanya 43,6% kegiatan bidang pendidikan dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD sedangkan sisanya sebesar 56,4% tidak terakomodir. Sementara itu

kegiatan bidang pendidikan di APBD yang konsisten terhadap RKPD hanya 63%, sedangkan sisanya 37% tidak konsisten terhadap RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2009.

Secara keseluruhan dari tiga tahun anggaran (2007-2009), konsistensi penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang tidak begitu bagus. Pada Tahun 2007 konsistensi penyusunan APBD terhadap RKPD sebesar 66,7%, kemudian pada tahun 2008 turun menjadi 47,6%, dan pada tahun 2009 menunjukkan angka 63%.

Dari hasil analisa yang telah dilakukan di atas terlihat bahwa keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang pada tahun 2007-2009 masih rendah. Ini berarti sebagian besar penyusunan anggaran pendidikan di Kota Padang Panjang tidak memperhatikan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana amanat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Padahal keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran tersebut merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Dengan demikian rendahnya keterkaitan dan keseimbangan tersebut tentu akan menyebabkan pengelolaan pembangunan menjadi tidak efektif yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikut:

5.2 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

Sehubungan dengan analisa terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan pada sub bab sebelumnya, maka penulis juga menganalisa tentang pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tiga tahun terakhir yaitu 2007-2009 dan mengaitkannya dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan. Hal ini dilakukan untuk melihat implikasi konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan terhadap kinerja pendidikan di Kota Padang Panjang.

Ada dua indikator kinerja bidang pendidikan yang penulis analisa dalam penelitian ini. Pertama adalah indikator kinerja pendidikan yang disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah oleh pemerintah Kota Padang Panjang

yaitu Renstra Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2009 dan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut indikator kinerja daerah. Kedua adalah indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

5.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Pendidikan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009

Dalam Dokumen perencanaan jangka menengah daerah baik Renstra Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 maupun RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 telah ditetapkan indikator-indikator kinerja sesuai dengan bidang masing-masing beserta dengan target pencapaiannya untuk dijadikan tolok ukur dalam pembangunan di masing-masing bidang tersebut di Kota Padang Panjang sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Sehubungan dengan analisa penulis sebelumnya mengenai konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009, maka selanjutnya penulis akan menganalisa pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan dari tahun 2007-2009 untuk melihat implikasi dari konsistensi tersebut terhadap pencapaian indikator kinerja daerah.

Untuk tahun 2007 dan 2008, indikator kinerja bidang pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sama karena tahun tersebut berada pada periode perencanaan jangka menengah (Renstra) yang sama yaitu Renstra Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008. Berikut akan disajikan target serta capaian indikator kinerja pendidikan tahun 2007-2008.

Tabel 5.4
Target dan Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Tahun 2007 dan 2008

No	Indikator	2007			2008		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
			Capaian	%		Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terselenggaranya PAUD	5 PAUD	10 PAUD	100	5 PAUD	-	0
2.	Penanaman prinsip kewirausahaan Islam SD	-Pelatihan -Pengajaran	Pengajaran	50	Pengajaran di SD	-	0
3.	Pemahaman prinsip kewirausahaan Islam SLTP	-Pelatihan guru - pengajaran	Pengajaran	50	Pengajaran di SLTP	-	0
4.	Penguasaan dan praktek kewirausahaan Islam SLTA	-Pelatihan guru - magang siswa - pengajaran	Pengajaran	33	Pengajaran di SLTA	-	0
5.	Melek huruf Latin, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	- Rekayasa kurikulum bahasa Inggris - pelatihan guru bahasa Inggris - Kajian tentang metode pembelajaran yang islami - pelatihan guru dalam pembelajaran yang islami.	Pelatihan guru bahasa Inggris	25	Pelatihan guru Bahasa Inggris, Pelatihan guru Bahasa Arab, Kajian tentang metode pembelajaran yang Islami dan pelatihan guru dalam pembelajaran yang islami	-	0
6.	Terlaksananya pengajaran dan pengkajian ABS-SBK	Workshop ABS-SBK	Workshop ABS-SBK	100	3 lembaga pengajaran dan pengkajian adat	-	0
7.	Penyelenggaraan BAM	Revisi dan penyempurnaan buku BAM	-	0	Pengajaran BAM SD-SMP	Pengajaran BAM SD-SMP	100

Tabel 5.4 (sambungan)

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Angka mengulang	SD 3,49 SLTP 0,62 SLTA 0,20	SD 10,98 SLTP 0,74 SLTA 0,37	32 83 54	SD 3,0 SLTP 0,5 SLTA 0,15	SD 5,09 SLTP 0,81 SLTA 0,94	58 61 16
9.	Rata-rata nilai UAN	-SD 6,73 -SLTP 6,51 SLTA -IPA 6,82 -IPS 6,08	- SD 7,13 - SLTP 5,75 SLTA - IPA 6,83 - IPS 6,99	94 100 100 100	-SD 6,85 -SLTP 6,68 SLTA -IPA 6,88 - IPS 6,17	- SD 6,81 - SLTP 6,02 IPA - IPA 6,73 - IPS 6,53	- 99 - 90 -98 -100
10.	Rata-rata lama bersekolah	11,2	11,64	100	11,5	12,09	100
Rata-rata realisasi capaian 2007				68%	Realisasi capaian 2008		48%

Sumber: Renstra dan Evaluasi Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target dari indikator kinerja bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 ada yang bersifat kuantitatif dan ada juga yang kualitatif. Namun untuk penghitungan persentase realisasi kinerja terhadap target dilakukan secara kuantitatif dengan cara membandingkan antara realisasi capaian terhadap target. Misalnya apabila target capaiannya adalah 2 kegiatan, sedangkan realisasinya hanya 1 kegiatan maka penulis menilai kinerja indikator tersebut sebesar 50%.

Sedangkan hasil penghitungan kinerja pendidikan secara keseluruhan dalam satu tahun dilakukan dengan menggunakan penghitungan rata-rata yaitu:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Penjumlahan realisasi kinerja tiap indikator}}{\text{Jumlah indikator}}$$

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa kinerja pendidikan pada tahun 2007 adalah sebesar 68%, dan tahun 2008 menunjukkan angka 48%. Berikut akan disajikan analisa terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja bidang pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2008.

1. Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada indikator terselenggaranya PAUD ini, target yang ditetapkan dalam Renstra selama lima tahun sampai tahun 2008 adalah dibangunnya 16 PAUD pada 16 kelurahan dimana untuk tahun 2007 dan 2008 ditargetkan akan dibangun masing-masing 5 tahun tiap tahunnya. Namun dalam realisasinya pada tahun 2007 telah dibangun 10 PAUD, yang artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan target untuk lima tahun tersebut telah

terpenuhi pada tahun 2007, sehingga target pada tahun 2008 untuk membangun 5 PAUD lagi tidak jadi terlaksana karena sudah terealisasi pada tahun 2007.

2. Penanaman Prinsip Kewirausahaan Islam

Untuk pencapaian indikator penanaman prinsip kewirausahaan Islam ini maka dalam Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 telah ditetapkan target pencapaian. Untuk tahun 2007 ditargetkan terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi guru SD serta terlaksananya pengajaran tentang kewirausahaan di jenjang pendidikan SD. Sedangkan untuk tahun 2008 ditargetkan akan dilaksanakan pengajaran kewirausahaan di SD.

Dalam realisasinya, pada tahun 2007 pelatihan tidak terlaksana, hanya pengajaran di SD yang terlaksana, untuk itu realisasi pada indikator ini diberikan bobot 50%. Sedangkan pada tahun 2008 pengajaran kewirausahaan di SD tidak dapat terlaksananya yang artinya target untuk tahun 2008 tidak terpenuhi sama sekali maka kinerja untuk indikator ini diberikan nilai 0%.

3. Pemahaman Prinsip Kewirausahaan Islam

Pada indikator ini, juga ditetapkan target yang sama pada tahun 2007 dan 2008. Tahun 2007 ditargetkan terlaksananya pelatihan kewirausahaan kepada guru SLTP dan pengajaran kewirausahaan kepada siswa di SLTP. Namun realisasinya hanya terlaksananya pengajaran di SLTP, sedangkan pelatihan kepada guru tidak terlaksana. Oleh karena itu untuk tahun 2007 realisasi pencapaian targetnya dinilai sebesar 50%. Sedangkan pada tahun 2008, target untuk pelaksanaan pengajaran kewirausahaan di sekolah sama sekali tidak terlaksana, maka nilainya adalah 0%.

4. Penguasaan dan praktek kewirausahaan

Sama halnya dengan indikator sebelumnya, pada target indikator penguasaan dan praktek kewirausahaan ini juga tidak terealisasi 100%. Dari tiga kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2007, yaitu magang, pelatihan dan pengajaran kewirausahaan pada siswa SLTA, hanya satu kegiatan yang terlaksana yaitu pengajaran. Oleh karena itu bobot yang diberikan untuk

persentase realisasi tahun 2007 ini adalah 33%. Dana karena pada tahun 2008 tidak ada kegiatan yang terlaksana sama sekali maka diberikan nilai 0%.

5. Melek huruf latin, bahasa Arab dan Bahasa Inggris

Untuk indikator ini ditargetkan pada tahun 2007 terlaksananya 4 kegiatan yaitu rekayasa kurikulum bahasa Inggris, pelatihan guru Bahasa Inggris, kajian tentang metode pembelajaran yang Islami dan pelatihan guru dalam pembelajaran yang bernuansa Islami. Namun realisasinya hanya terlaksana satu kegiatan dari empat kegiatan tersebut, artinya persentase realisasi dari indikator kinerja tersebut hanya sebesar 25%. Sementara itu pada tahun 2008, target tersebut tidak terlaksana sama sekali sehingga realisasinya sama dengan 0%.

6. Terlaksananya pengajaran dan pengkajian ABS-SBK

ABS-SBK merupakan singkatan dari “*Adat Basandi Syara’, Syara Basandi Kitabullah*” yaitu suatu filosofi yang menjadi dasar dalam setiap sendi kehidupan di Minang Kabau. Pada tahun 2007 ditargetkan terlaksananya workshop tentang pengkajian ini dan terlaksana atau terealisasi sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan terbentuknya 3 lembaga khusus pengkajian adat di Kota Padang Panjang namun tidak ada terealisasi satupun sehingga untuk realisasi capaian pada tahun 2008 ini diberi nilai 0%.

7. Terselenggaranya Pengajaran Budaya Adat Minangkabau (BAM)

Untuk indikator ini, pada tahun 2007 ditargetkan akan terevisinya buku BAM, namun tidak terlaksana atau ditunda pelaksanaannya pada tahun 2008. Sehingga tidak ada realisasi (0%) dari capaian kinerja pada tahun 2007 ini. Sementara itu untuk tahun 2008, target yang ditetapkan sebelumnya yaitu pengajaran BAM di SD dan SMP terlaksana atau terealisasi 100%.

8. Angka Mengulang

Pada tahun 2007 ditargetkan angka mengulang siswa adalah 3,49 untuk SD, 0,62 untuk SMP dan 0,20 untuk SMA. Namun target tersebut tidak terpenuhi

karena realisasinya masih di atas dari angka yang ditetapkan yaitu sebesar, 10,98 untuk SD, 0,74 untuk SMP dan 0,37 untuk SMA.

Sedangkan pada tahun 2008, angka mengulang ini relatif belum memenuhi target namun bila dibandingkan dengan angka mengulang pada tahun 2007 sudah mengalami penurunan. Dimana target untuk tahun 2008 adalah 3,0 untuk SD, 0,5 untuk SMP dan 0,15 untuk SMA. Sedangkan realisasinya adalah 5,09 untuk SD, 0,81 untuk SMP dan 0,94 untuk SMA.

9. Rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN)

Untuk indikator rata-rata nilai UAN di Kota Padang Panjang, pada tahun 2007 rata-rata sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2007 kecuali untuk nilai UAN SMP. Sedangkan pada tahun 2008, nilai UAN di semua jenjang pendidikan berada di bawah target yang ditetapkan sebelumnya kecuali untuk SMA IPS.

10. Rata-rata lama bersekolah

Indikator terakhir yang ada dalam Renstra untuk melakukan penilaian keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Padang Panjang adalah rata-rata lama bersekolah. Baik pada tahun 2007 maupun tahun 2008, rata-rata lama bersekolah sudah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008. Tahun 2007 ditargetkan rata-rata lama bersekolah adalah 11,2 Tahun dan Tahun 2008 11,5 Tahun. Namun realisasi pada tahun 2007 dan 2008 sudah melampaui target yaitu menjadi 11,64 pada tahun 2007 dan 12,09 pada tahun 2008.

Sementara itu untuk menganalisis indikator kinerja daerah tahun 2009, penulis mengacu kepada indikator kinerja bidang pendidikan yang ada pada dokumen RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 karena tahun 2009 merupakan tahun pertama pelaksanaan perencanaan jangka menengah tersebut. Untuk melihat capaian indikator kinerja bidang pendidikan pada tahun 2009 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.5
Target dan Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Tahun 2009

No	Indikator	Target dan Realisasi 2009		
		Target	Realisasi	
			Capaian	%
1.	Terselenggaranya kegiatan keagamaan di sekolah negeri setiap hari sekolah	33 SD, 5 SMP, 3 SMA, 2 SMK	33 SD, 5 SMP, 3 SMA, 2 SMK	100%
2.	Tersedianya tempat ibadah dan berwudhu yang representatif	Tempat ibadah: - SD : 7 - SMP : 2 - SMA : 2 - SMK : 1 Tempat wudhu - SD : 8 - SMP : 3 - SMA : 3 - SMK : 2	Tempat ibadah: - SD : 7 - SMP : 2 - SMA : 2 - SMK : 1 Tempat wudhu - SD : 8 - SMP : 3 - SMA : 3 - SMK : 2	100%
3.	Terselenggaranya forum kajian Islam setiap bulan	12 kali se tahun	-	0%
4.	Angka partisipasi kasar PAUD	88,6%	95,42%	100%
5.	Penggunaan ICT moving class SD gugus	7 SD Gugus	7 SD Gugus	100%
6.	Penggunaan ICT moving class di semua ruang belajar di semua SMP , SMA dan SMK Negeri	5 SMP, 3 SMA dan 2 SMK	5 SMP, 2 SMA dan 2 SMK	90%
7.	Penggunaan ICT 1 moving class sekolah swasta dan agama	10 sekolah	-	0%
8.	Terbentuknya sekoah standar nasional	- 1 SD - 2 SMP - 1 SMA/SMK	- 1 SD - 2 SMP - 1 SMA/SMK	100%
9.	Terbentuknya sekolah rintisan bertaraf internasional	- 1 SD - 1 SMP - 1 SMA	-	0
10.	Sertifikasi guru	70%	70%	100%
11.	APM SLTA	97,96%	98%	100%
12.	Forum kajian budaya	1 Forum per nagari	-	0%
Rata-rata persentase realisasi capaian				66%

Sumber: Evaluasi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (data diolah)

Universitas Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyusunan indikator pendidikan yang termuat dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 ada yang bersifat kuantitatif dan ada yang bersifat kualitatif dan masih belum mengacu kepada indikator kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nasional. Berikut akan disajikan analisa penulis terhadap pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan tersebut:

1. Terselenggaranya kegiatan keagamaan di sekolah negeri setiap hari sekolah

Untuk indikator pertama ini, yaitu terselenggaranya kegiatan keagamaan di sekolah negeri setiap hari sekolah ditargetkan terlaksana pada 33 SD, 5 SMP, 3 SMA dan 2 SMK. Realisasinya pada tahun 2009 sudah sesuai dengan target (100%), dimana kegiatan keagamaan tersebut sudah terlaksana pada setiap hari sekolah di 33 SD, 5 SMP, 3 SMA dan 2 SMK.

2. Tersedianya tempat ibadah dan berwudhu yang representatif

Sesuai dengan target RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013, maka untuk tahun 2009 telah terbangun tempat wudhu yang representatif di 8 SD, 3 SMP, 3 SMA dan 2 SMK. Artinya realisasi pencapaian target indikator kinerja bidang pendidikan ini sudah mencapai angka 100%.

3. Terselenggaranya forum kajian Islam setiap bulan

Untuk indikator terselenggaranya forum kajian Islam setiap bulan selama tahun 2009 ini belum terealisasi sama sekali. Dengan demikian maka realisasi dari indikator kinerja ini adalah 0%.

4. Angka partisipasi kasar PAUD

Sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Padang Panjang pada tahun 2009 sudah mencapai 95,42%, angka ini sudah melebihi target pada tahun 2009 yang berjumlah 88,6%. Oleh karena itu realisasi terhadap pencapaian indikator kinerja APK PAUD ini sudah mencapai 100%.

5. Penggunaan ICT *moving class* SD gugus

Moving class adalah tersedianya sebuah kelas yang memiliki sarana ICT yang bisa dimanfaatkan secara bergantian semua murid. Target penggunaan ICT (multimedia) dalam penyelenggaraan pembelajaran di 1 *moving class* di masing-masing SD gugus sudah dapat dicapai 100% pada tahun 2009 sesuai dengan target yang dibebankan oleh RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013. Ada 7 SD Gugus di Kota Padang Panjang, dan masing-masing SD sudah memiliki *moving class* yang menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan multimedia atau teknologi informasi.

6. Penggunaan ICT *moving class* di semua ruang belajar di semua SMP , SMA dan SMK Negeri

Target penggunaan ICT dalam penyelenggaraan pembelajaran di *moving class* pada tahun 2009 adalah 5 SMP, 3 SMA dan 2 SMK . Namun pada tahun 2009, target ini baru terealisasi 90% dimana baru terlaksana di 5 SMP, 2 SMA dan 2 SMK.

7. Penggunaan ICT pada *moving class* sekolah swasta dan agama

Untuk target penggunaan ICT pada *moving class* sekolah swasta dan agama pada tahun 2009 tidak ada terealisasi sama sekali. Oleh karena itu persentase realisasi pencapaian target indikator ini sama dengan 0%.

8. Terbentuknya sekolah standar nasional

Pada tahun 2009 ditargetkan terbentuknya sekolah berstandar nasional 1 SD, 1 SMP dan 1 SMA. Namun realisasinya pada tahun 2009 belum ada sama sekali sekolah SD, SMP dan SMA di Kota Padang Panjang yang berstandar nasional. Dengan demikian, realisasi capaian dari target kinerja ini adalah 0%.

9. Terbentuknya sekolah rintisan bertaraf internasional

Begitu juga dengan indikator terbentuknya sekolah rintisan bertaraf internasional yang ditargetkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang sebanyak 1 SD, 1 SMP dan 1 SMA ternyata belum terealisasi sama sekali atau 0%.

10. Sertifikasi guru

Sementara itu untuk mencapai sasaran tersertifikasinya guru yang memenuhi syarat pada tahun 2009, maka berdasarkan data dari dinas pendidikan ternyata sampai akhir 2009 telah tersertifikasi 273 orang guru di Kota Padang Panjang. Angka ini sudah memenuhi target 70% dari total jumlah guru PNS seluruhnya yang berjumlah 390 orang. Dengan demikian realisasi capaian untuk indikator ini sudah mencapai 100%.

11. APM SLTA

Target RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 untuk APM SLTA adalah 97,96%. Target ini sudah terpenuhi dengan meningkatnya APM SLTA di kota Padang Panjang yang mencapai angka 98%. Artinya realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

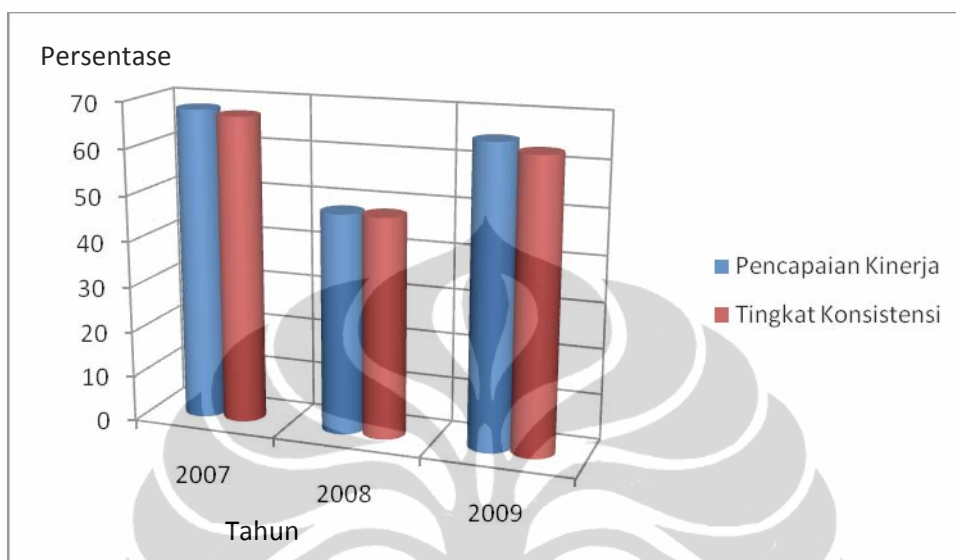
12. Forum kajian budaya

Sasaran terakhir yang hendak dicapai di bidang pendidikan adalah terwujudnya forum kajian budaya dengan target pada tahun 2009 adalah terbentuknya 1 (satu) forum per nagari. Namun target ini tidak terlaksana pada tahun 2009. Dengan demikian maka realisasi capaian indikator ini adalah 0%.

Secara keseluruhan analisa terhadap pencapaian indikator kinerja daerah bidang pendidikan dari tahun 2007-2009 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2007, realisasi pencapaian indikator kinerja dari target yang ditetapkan adalah sebesar 68%, kemudian pada tahun 2008 realisasi pencapaian indikator kinerja pendidikan ini menurun menjadi hanya 48% dari target yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2009 pencapaian indikator kinerja ini meningkat menjadi 66% dari target yang telah ditetapkan.

Dari analisa terhadap pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan selama 3 (tiga) tahun seperti yang telah dibahas di atas yaitu dari tahun 2007-2009, ternyata jika dikaitkan dengan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan memiliki pola yang sama. Maksudnya adalah ketika tingkat konsistensi lebih tinggi, maka realisasi target pencapaian indikator kinerja daerah juga tinggi atau ketika tingkat konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran bidang pendidikan lebih rendah maka realisasi capaian indikator kinerja daerah bidang pendidikan tersebut juga lebih rendah. Hal bisa dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 5.4
Grafik Tingkat Konsistensi dan Pencapaian Indikator Kinerja
Bidang Pendidikan

Sumber: RKPD, APBD dan Evaluasi Renstra Kota Padang Panjang (data diolah)

Grafik di atas menggambarkan bahwa pola grafik tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dari tahun 2007-2009 sama dengan pola grafik tingkat realisasi pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan dari tahun 2007-2009. Di tahun 2007, tingkat konsistensi penyusunan RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007 menunjukkan angka sebesar 66,7%, pada tahun yang sama tingkat realisasi capaian indikator kinerja bidang pendidikan menunjukkan angka 68%. Pada tahun 2008, tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran turun menjadi 47,6% dimana tingkat realisasi pencapaian indikator kinerja juga mengalami penurunan sehingga menjadi 48%. Selanjutnya pada tahun 2009, tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan naik dari tahun sebelumnya menjadi 63%, begitu juga dengan tingkat realisasi pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan yang naik dari tahun sebelumnya menjadi 66%.

Hasil analisa antara tingkat konsistensi dengan tingkat realisasi pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa naik turunnya tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan diikuti juga oleh naik turunnya tingkat realisasi pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan. Artinya ada keterkaitan antara konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan realisasi pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah Kota Padang Panjang..

Adanya keterkaitan tersebut bisa dijelaskan karena indikator kinerja yang disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kota Padang Panjang merupakan indikator yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang relevan sehingga apabila terjadi inkonsistensi terhadap kegiatan tersebut dalam penganggarnya, otomatis kegiatan tidak bisa terlaksana yang akhirnya mengakibatkan target yang ditetapkan tidak tercapai dan sasaran pembangunan pun tidak terwujud.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari analisa ini bahwa inkonsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang telah menyebabkan tidak tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kota Padang Panjang. Dengan kata lain, ada keterkaitan antara konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan itu sendiri.

Kemudian apakah konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan tersebut juga mempunyai kaitan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan? Analisa tersebut akan penulis lakukan dalam sub bab berikut.

5.2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Pendidikan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Dalam kaitannya dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009, penulis juga melakukan analisa terhadap indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayan Minimal Bidang Pendidikan. Hal ini dilakukan karena indikator kinerja daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang telah dianalisa di atas berbeda dengan indikator kinerja menurut SPM bidang pendidikan dan penyusunan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang belum mengacu pada SPM bidang pendidikan. Oleh karena itu, melalui analisa berikut diharapkan dapat terjawab permasalahan apakah konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di kota Padang Panjang juga mempengaruhi kinerja pendidikan di Kota Padang Panjang berdasarkan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Ada beberapa indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja bidang pendidikan. Namun disebabkan karena keterbatasan data yang diperoleh di lapangan maka disini penulis menggunakan 4 (empat) indikator untuk setiap jenjang pendidikan yaitu:

1. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah dengan jumlah penduduk yang sesuai dari jenjang tertentu. Angka ini digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk bersekolah. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Rumus:

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa tingkat pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia pendidikan tertentu}} \times 100\%$$

2. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah (APS) adalah perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dengan jumlah siswa sesuai jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus

sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Rumus:

$$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah di tingkat pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah siswa di tingkat pendidikan tertentu}} \times 100\%$$

3. Angka Kelayakan Mengajar (% Guru Layak)

Angka kelayakan mengajar adalah perbandingan antara jumlah pendidik yang layak dengan jumlah pendidik seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu. Angka ini digunakan untuk menilai kualitas pendidikan di suatu daerah.

Rumus:

$$\% \text{ guru layak} = \frac{\text{Jumlah pendidik yang layak}}{\text{Jumlah pendidik}} \times 100\%$$

4. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)

Rasio siswa per kelas adalah perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu dalam satu kelas dimana angkaini digunakan untuk melihat pemerataan akses pendidikan di suatu daerah

Sementara itu untuk menilai capaian kinerja pendidikan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan di atas, penulis menggunakan teknik persentase dengan cara membandingkan antara angka capaian kinerja di Kota Padang Panjang pada tahun tersebut dengan angka yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal. Apabila angka realisasi telah melewati angka SPM, tetap diberikan skors 100%.

Dan untuk melakukan penilaian kinerja dalam satu tahun dilakukan dengan menghitung rata-rata yaitu:

$$\text{Kinerja Pendidikan} = \frac{\text{penjumlahan capaian kinerja dalam satu tahun}}{\text{Jumlah indikator}}$$

Berikut akan disajikan capaian kinerja pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kota Padang Panjang tahun 2007-2009.

1. Kinerja Pendidikan Tahun 2007

Pada tahun 2007 telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pendidikan, namun apakah program dan kegiatan tersebut telah mendukung terlaksananya pencapaian kinerja pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pusat, jawabannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.6
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan berdasarkan SPM Bidang Pendidikan Di Kota Padang Panjang Tahun 2007

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		Realisasi	SPM	Nilai
1	SD/MI			
	- APM	91,4	95	96,2%
	- APS	19	1	5,3%
	- %Guru Layak	83,9	90	92,9%
	- R-S/K	26	30-40	86,7%
2	SMP/MTs			
	- APM	93,9	90	100,0%
	- APS	1,05	1	95,2%
	- % Guru Layak	82,4	90	91,5%
	- R-S/K	28	30-40	93,3%
3	SMA/SMK/MA			
	- APM	128,4	60	100,0%
	- APS	1,37	1	73,0%
	- % Guru Layak	80,5	90	89,4%
	- R-S/K	30	30-40	100,0%
Nilai Kinerja Pendidikan Tahun 2007				85,3%

Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2007(data diolah)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada beberapa indikator SPM yang belum terpenuhi seperti APM SD yang masih berada di bawah SPM pendidikan. Artinya pemerataan pendidikan untuk tingkat SD masih berada di bawah standar dan perlu dipacu lagi. Sementara itu APM SMP dan SMA sudah jauh berada di atas SPM bahkan lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA, banyak siswa yang berasal dari luar daerah sehingga angkanya menjadi sangat tinggi.

Untuk indikator angka putus sekolah, rata-rata pada tahun 2007 masih tinggi yang artinya belum memenuhi SPM. Angka yang paling tinggi ada pada tingkat SD dimana persentase siswa yang putus sekolah mencapai angka 19%. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA angkanya sudah tergolong rendah yaitu 1,05% dan 1,37% walaupun angka ini masih belum memenuhi SPM pendidikan.

Guru yang tergolong layak sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2007 di Kota Padang Panjang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal. SPM mensyaratkan 90% guru harus memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional. Angka ini belum terpenuhi untuk semua jenjang pendidikan, yang artinya kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang harus ditingkatkan lagi agar memenuhi standar.

Rasio jumlah siswa per kelas yang ditetapkan dalam SPM berjumlah 30-40 siswa. Sementara di Kota Padang Panjang pada tahun 2007 jumlah ini masih belum terpenuhi untuk tingkat SD dan SMP. Di tingkat SD rasio siswa per kelas adalah 26 sedangkan di SMP berjumlah 28. Artinya kelas masih bisa menampung lebih banyak siswa lagi dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan.

Secara keseluruhan, kinerja pendidikan di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2007 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal adalah 85,29%. Artinya pada tahun ini kinerja pendidikan belum memenuhi standar pelayanan minimal dimana angka yang tertinggi jika semua indikator SPM terpenuhi adalah 100%.

2. Kinerja Pendidikan Tahun 2008

Selanjutnya penulis akan melihat kinerja pendidikan di Kota Padang Panjang pada tahun 2008 yang dinilai melalui pencapaian indikator kinerja menurut SPM bidang pendidikan. Hasil capaian indikator kinerja di Kota Padang Panjang bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.7
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan berdasarkan SPM Bidang Pendidikan
Di Kota Padang Panjang Tahun 2008

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		Realisasi	SPM	Nilai
1	SD/MI			
	- APM	89,9	95	94,7%
	- APS	0,14	1	100,0%
	- % Guru Layak	84,7	90	94,1%
	- R-S/K	27	30-40	90,0%
2	SMP/MTs			
	- APM	96,6	90	100,0%
	- APS	0,21	1	100,0%
	- % Guru Layak	85,9	90	95,5%
	- R-S/K	29	30-40	96,7%
3	SMA/SMK/MA			
	- APM	123,3	60	100,0%
	- APS	0,40	1	100,0%
	- % Guru Layak	81,3	90	90,4%
	- R-S/K	30	30-40	100,0%
Nilai Kinerja Pendidikan Tahun 2008				96,8%

Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2008 (data diolah)

Pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui indikator APM menunjukkan bahwa untuk tingkat SD, angka partisipasi murni siswa masih berada di bawah standar yaitu 89,9%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA angka partisipasi ini sudah melebihi standar bahkan di atas 100%. Hal terjadi karena banyaknya siswa SMP dan SMA yang berasal dari luar kota Padang Panjang.

Sementara itu siswa yang putus sekolah pada tahun 2008 sudah mulai turun dengan angka untuk semua tingkat pendidikan dibawah 1%. Artinya indikator APS di Kota Padang Panjang pada tahun 2008 sudah memenuhi standar nasional.

Guru yang mempunyai kompetensi secara nasional yang ditunjukkan melalui persentase guru layak mengajar di Kota Padang Panjang pada tahun 2008 masih belum memenuhi SPM. Untuk tingkat SD, angka kelayakan

mengajar ini sebesar 84,7%, sedangkan di SMP sebesar 85,9% dan di SMA sebesar 81,3%.

Standar rasio siswa per kelas yang ditetapkan dalam SPM masih belum bisa dipenuhi pada semua jenjang pendidikan di Kota Padang Panjang pada tahun 2008 ini. Hanya tingkat SMA yang sudah memenuhi standar sedangkan untuk tingkat SD dan SMP masih belum menggambarkan angka pemerataan pendidikan karena jumlah siswa per kelas masih berada di bawah 30 yaitu 27 untuk SD dan 29 untuk SMP.

Secara keseluruhan kinerja pendidikan pada tahun 2008 ini masih belum sampai 100% sesuai dengan standar pelayanan minimal. Namun angka pada tahun 2008 sebesar 96,8 sudah meningkat dari tahun 2007. Artinya pada tahun 2008 ini ada perbaikan kinerja pendidikan ke arah yang lebih baik.

3. Kinerja Pendidikan Tahun 2009

Hasil capaian kinerja pendidikan tahun 2009 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.8
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan berdasarkan SPM Bidang Pendidikan Di Kota Padang Panjang Tahun 2009

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		Realisasi	SPM	Nilai
1	SD/MI			
	- APM	92,0	95	100,0%
	- APS	0,08	1	100,0%
	- % Guru Layak	87,9	90	97,7%
	- R-S/K	17	30-40	56,7%
2	SMP/MTs			
	- APM	93,2	90	100,0%
	- APS	1,03	1	100,0%
	- % Guru Layak	88,8	90	98,7%
	- R-S/K	29	30-40	96,7%
3	SMA/SMK/MA			
	- APM	112,2	60	100,0%
	- APS	1,16	1	90,9%
	- % Guru Layak	79,7	90	88,5%
	- R-S/K	26	30-40	86,7%
Nilai Kinerja Pendidikan Tahun 2009				93,0%

Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun (data diolah)

Angka partisipasi murni (APM) SD di Kota Padang Panjang Tahun 2009 menunjukkan angka 92,0%. Angka naik dari tahun sebelumnya namun masih belum memenuhi standar pelayanan minimal sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu APM SMP pada tahun 2009 turun menjadi 93,2%, namun turunnya ini tidak mempengaruhi kinerja karena angka tersebut sudah di atas standar nasional. Sedangkan APM SMA juga turun dari tahun sebelumnya menjadi 112,2% namun angka tersebut sudah berada di atas standar nasional.

Siswa Kota Padang Panjang yang putus sekolah sudah relatif sedikit jumlahnya. Di tingkat SD angkanya sudah dibawah 1% yang artinya sudah memenuhi SPM sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA berjumlah 1,03 dan 1,16 dimana angka ini masih belum memenuhi SPM pendidikan.

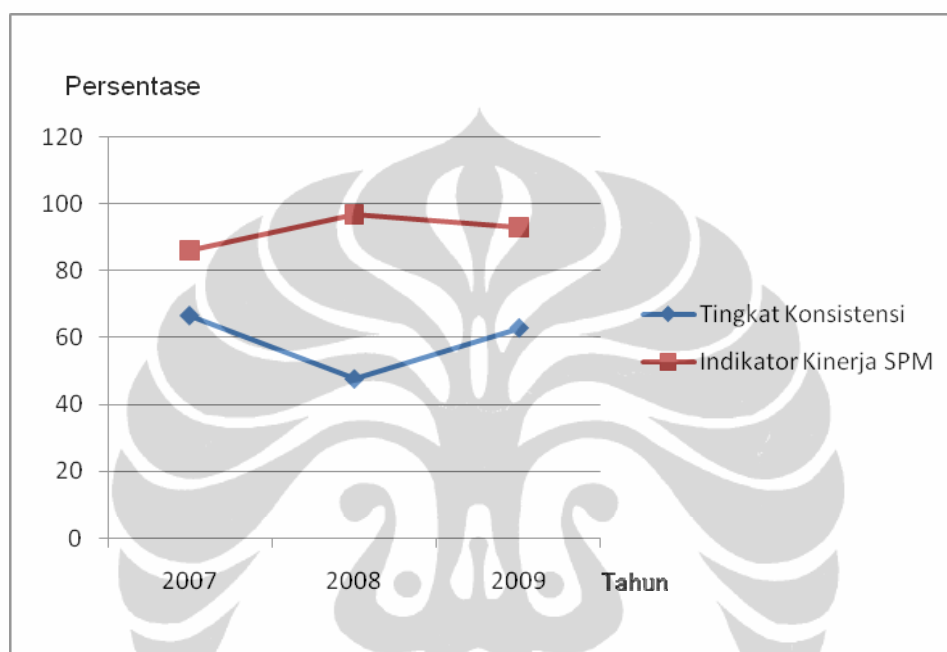
Sementara itu persentase guru yang layak mengajar menurut standar nasional di Kota Padang Panjang pada tahun 2009 belum ada yang memenuhi standar pelayanan minimal. Angka persentase guru yang layak mengajar masih berada dibawah 90%. Untuk SD angka kelayakan guru ini adalah 87,9%, sedangkan untuk SMP adalah 88,8% dan untuk SMA adalah 79,7%.

Rasio siswa per kelas pada tahun 2009 menunjukkan angka yang masih dibawah standar minimal seluruhnya. Baik di SD, SMP maupun SMA, rasio siswa per kelas masih berada di bawah 30. Ini berarti pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang masih belum baik.

Kinerja pendidikan secara keseluruhan di Kota Padang Panjang pada tahun 2009 ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 96% dimana pada tahun ini berada pada angka 93%. Artinya ada beberapa indikator pada tahun sebelumnya yang sudah menunjukkan kemajuan, namun pada tahun 2009 mengalami kemunduran.

Selama tiga tahun dari tahun 2007-2009, kinerja pendidikan di Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang tidak konsisten. Artinya kadang naik dan kadang turun. Pada tahun 2007 kinerja pendidikan di Kota Padang Panjang relatif lebih rendah dan pada tahun 2008 meningkat namun pada tahun 2009 turun lagi walaupun turunnya tidak sampai pada angka di tahun 2007.

Jika dikaitkan dengan pembahasan konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009, maka kinerja bidang pendidikan berdasarkan indikator SPM ini mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat konsistensi. Hal ini bisa dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 5.5
Grafik Tingkat Konsistensi dan Pencapaian Indikator Kinerja SPM
Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009

Sumber: Profil Pendidikan, RKPD dan APBD Tahun 2007-2009 (data diolah)

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa ada hubungan yang terbalik antara capaian kinerja pendidikan berdasarkan SPM dengan tingkat konsistensi. Maksudnya ketika tingkat konsistensi tinggi pada tahun 2007, kinerja pendidikan menjadi rendah. Kemudian ketika tingkat konsistensi menurun tajam pada tahun 2008 maka kinerja pendidikan naik dan pada saat tingkat konsistensi naik pada tahun 2009, maka kinerja pendidikan menjadi turun.

Berbeda dengan analisa sebelumnya pada indikator kinerja daerah, dimana tingkat konsistensi berbanding lurus dengan kinerja pendidikan, yang artinya tingkat konsistensi mempengaruhi sasaran pembangunan yang telah ditetapkan

daerah. Pada kasus kinerja berdasarkan SPM ini tingkat konsistensi tidak mempengaruhi pencapaian kinerja bidang pendidikan. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada saat konsisten dengan perencanaan ternyata tidak mendukung peningkatan kinerja SPM. Dan ketika kegiatan yang dilakukan tidak konsisten terhadap perencanaan, justru malah membuat tingginya kinerja pendidikan.

Maka berdasarkan pada analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan bidang pendidikan dalam dokumen perencanaan ternyata tidak mendukung pencapaian kinerja berdasarkan SPM bidang pendidikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sasaran pembangunan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan jangka menengah tidak sinkron dengan kebijakan nasional yang ditunjukkan dengan bertentangnya antara kinerja pendidikan yang dilihat berdasarkan indikator kinerja daerah dengan kinerja pendidikan berdasarkan indikator SPM pendidikan. Pertentangan disini terlihat ketika kinerja daerah naik, kinerja SPM turun dan sebaliknya ketika kinerja daerah turun, pencapaian kinerja SPM meningkat.

Pendapat di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pendidikan yang mengatakan bahwa penyusunan perencanaan pendidikan di Kota Padang Panjang memang belum mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. Baik dalam menetapkan kebijakan, sasaran pembangunan maupun indikator kinerja pendidikan, pemerintah daerah tidak berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan ditetapkannya SPM itu sendiri dimana SPM dibuat sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. SPM harus diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah, serta menilai kapasitas daerah.

Dengan demikian berarti dalam penelitian ini ditemukan juga ketidaksinkronan antara kebijakan perencanaan bidang pendidikan yang disusun

oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dengan kebijakan nasional. Artinya bahwa keterkaitan antara perencanaan nasional dengan perencanaan daerah di Kota Padang Panjang masih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghendaki adanya keterkaitan antara perencanaan nasional dan daerah.

